

**ARKEOLOGI PEMIKIRAN CIVIL SOCIETY DALAM KHAZANAH
INTELEKTUAL ISLAM TRADISIONALIS DAN MODERNIS INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF ATAS PARADIGMA PEMIKIRAN
SOSIAL POLITIK ISLAM ABDURRAHMAN WAHID
DAN NURCHOLISH MADJID)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

STATE H A S H I N UNIVERSITY
NIM : 99363754
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRs. H. ZARKASYI ABD. SALAM
2. DRs. RIZAL QOSIM, M.Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAKSI

Diskursus *civil society* marak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi perubahan kondisi sosial politik yang disponsori oleh gerakan besar Reformasi. Seiring dengan proses perubahan ini, tercetus sebuah ide membentuk masyarakat madani dalam perspektif ke-Indonesia-an. Istilah Masyarakat Madani kemudian menjadi sebuah paradigma alternatif untuk mewujudkan cita-cita negara demokratis, berkeadilan, dan mengayomi sendi-sendi kemanusiaan.

Di kalangan publik, *civil society* diinterpretasi dan diadaptasi dalam berbagai kosakata, di antaranya masyarakat kewargaan, masyarakat utama, masyarakat sipil, dan masyarakat madani. Dan di antara berbagai terminologi tersebut, terdapat dua kecenderungan besar dalam wacana *civil society*, yakni “Masyarakat Sipil” yang disintesakan dari pemikiran filsafat sosial Barat dan “Masyarakat Madani” yang diderivasikan dari pemikiran sosial politik Islam. Dalam konteks dua kecenderungan ini, pencarian konsep, rekonstruksi sejarah, relevansi pemikiran serta perjuangan *civil society* kemudian menemukan satu titik signifikansi sekaligus menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Maksud penelitian ini semata-mata difokuskan pada upaya membedah pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai masyarakat sipil dan pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani dengan merunut kembali akar historis yang dijadikan oleh keduanya sebagai referensi. Dan mengingat konsep *civil society* bukanlah sebuah proses yang final atau sudah jadi, maka untuk memahaminya secara komprehensif haruslah dianalisis dengan menggunakan pendekatan arkeologis. Pendekatan arkeologis dimaksudkan untuk menelaah kembali formulasi *civil society* dan melacak kembali akar pemikiran yang menjadi rujukan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid dalam mengkonseptualisasikan visi masyarakat sipil dan masyarakat madani.

Melalui pendekatan arkeologis, dapat diungkapkan kemudian bahwa gagasan Abdurrahman Wahid mengenai masyarakat sipil sesungguhnya memiliki kemiripan dengan pemikiran Gramscian-Tocquevillian yang menekankan pada kemandirian masyarakat dalam hubungannya dengan negara dengan melakukan *counter culture* terhadap ideologi, pemikiran maupun paham keagamaan yang kontra produktif dengan demokratisasi dan *civil society*. Pandangan Abdurrahman Wahid seperti ini sangatlah berbeda dengan pandangan Nurcholish Madjid dalam menggagas masyarakat madani yang meskipun bernuansa Hegelian namun sebenarnya lebih berorientasi pada penciptaan kelas menengah sebagai basis pemberdayaannya. Bahkan dalam beberapa hal, pandangan Nurcholish Madjid mengenai masyarakat madani ternyata tidak cukup arif terhadap masyarakat tradisional, etnik dan budaya lokal, karena lebih bernuansa keislaman dan kemodernan. Dan disamping bias kelas, pandangan Nurcholish Madjid juga lebih mementingkan agenda Islam daripada agenda nasional karena diarahkan pada upaya menempatkan masyarakat madani sebagai proyeksi sekaligus ekspektasi sebuah konfigurasi masyarakat yang Islami.

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Hashin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hashin

N.I.M : 99363754

Judul : Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Khazanah Intelektual Islam
Tradisionalis Dan Modernis Indonesia (Studi Komparatif terhadap
Paradigma Pemikiran Sosial Politik Islam Abdurrahman Wahid dan
Nurcholish Madjid)

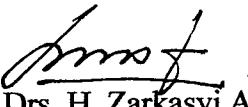
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2006 M.
29 Juiiadil Awal 1427 H.

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam
NIP. 150 046 306

Drs. Rizal Qosim M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Hashin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hashin

N.I.M : 99363754

Judul : Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Khazanah Intelektual Islam
Tradisionalis Dan Modernis Indonesia (Studi Komparatif terhadap
Paradigma Pemikiran Sosial Politik Islam Abdurrahman Wahid dan
Nurcholish Madjid)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2006 M.
29 Jumadil Awal 1427 H.

Pembimbing II

Drs. Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 150 256 649

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ARKEOLOGI PEMIKIRAN CIVIL SOCIETY DALAM KHAZANAH
INTELEKTUAL ISLAM TRADISIONALIS DAN MODERNIS INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP PARADIGMA PEMIKIRAN SOSIAL
POLITIK ISLAM ABDURRAHMAN WAHID DAN NURCHOLISH MADJID)**

Disusun oleh:

H A S H I N
NIM: 99363754

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada 11 Agustus 2006 M./
17 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana agama dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, Jum'at, 11 Agustus 2006 M.
17 Rajab 1427 H.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam
NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH, M. Hum.
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam
NIP. 150 046 306

Pembimbing II

Drs. Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 150 256 649

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam
NIP. 150 046 306

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya` mati تَنْسِي	ditulis ditulis	á <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya` mati كَرِيم	ditulis ditulis	í <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati يَنْكَمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَهْنَ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذُو الْفُرُوضْ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto:

**“Berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa,
bukan berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa”.**
(Abdurrahman Wahid)

**“Jangan percayakan nasib bangsa pada niat baik satu dua orang pemimpin. Percayakan
nasib bangsa pada sistem politik yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan”.**
(Nurcholish Madjid)

لَا يَنْبَغِي لِفَقِيرٍ أَنْ يَتَصَدَّى وَيَتَصَدَّرَ لِإِرْشَادِ النَّاسِ إِلَّا أَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ الْعُلَمَاءِ
وَسِيَاسَةَ الْمُلُوكِ وَحِكْمَةَ الْحُكَمَاءِ (الشيخ عبد القادر الجيلاني)

**Eksistensi dan kontribusi para pejuang sosial baru bisa diperhitungkan bila telah
memenuhi tiga persyaratan; memiliki kapasitas keilmuan, menguasai managemen publik
atau politik kemasyarakatan dan mempunyai kapabilitas kearifan.**

(Syaikh Abdul Qodir Al Jailani)

**Kudedikasikan karya ilmiah ini sebagai tanda keagumanku kepada sang prograssor,
pejuang Islam kultural; Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الججاد، الهادي إلى سبل الرشاد، وجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وأنزل من السماء ماء مباركا ليخرج به من الأرض زرعا ونباتا، وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصيها الأعداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الصاحبة والأولاد، شهادة ادخرها ليوم المعاد، وأستعين على الكبر والشداد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعله الله بركة ورحمة للعباد، أما بعد :

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengarahkan jalan pikiran, menunjukkan jalan kebenaran sekaligus menguji kualitas keimanan serta menjadikan seseorang sebagai hamba terkasih yang mampu mendengar suara hati, melihat dengan mata hati, bertutur dengan intuisi dan berpikir dengan rasionalitas wahyu Ilahi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Nabi, keluarga, sahabat-sahabat, dan segenap umat yang setia melaksanakan syari'at demi kedamaian dan keteraturan hidup di dunia dan akherat.

Skripsi yang berjudul **“Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Khazanah Intelektual Islam Tradisionalis Dan Modernis Indonesia: Studi Komparatif terhadap Paradigma Pemikiran Sosial Politik Islam Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid”** ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mencoba memberikan sebuah alternatif wacana sebagai media menumbuhkan civil society dengan mengangkat dua tokoh pemikir yang cukup kompeten dalam pemikiran sekaligus gerakan pembentukan tatanan masyarakat sipil

yang sejahtera, demokratis berkeadilan dan berkeadaban. Pilihan topik ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali wacana *civil society* sebagai sebuah landasan teoretis bagi upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa meskipun sudah mencurahkan segala kemampuan, tetapi dari salah satu sudut pandang tampaknya masih bisa dikatakan jauh dari kesempurnaan atau jauh dari idealitas yang diharapkan, namun penyusun tetap berharap semoga penelitian ini dapat menjadi satu kontribusi nyata bagi upaya pengembangan studi sosiologi dan politik Islam dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi berbagai fenomena dan tantangan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang senantiasa bergulir secara dinamis dan tajam.

Dalam kesempatan ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi bagi penyelesaian skripsi ini baik secara moril maupun materiil, terutama kepada yang terhormat;

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku pembimbing akademik sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah U I N Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Zarkasy Abd. Salam selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan yang berarti bagi substansi dan sistematika penyusunan skripsi ini.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan koreksi bagi ke-akurat-an penyusunan skripsi ini.

4. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang telah sungguh-sengguh memupuk daya nalar dan membentuk pola pikir mahasiswa yang berparadigma, kritis dan terarah.
5. Guru-guru penyusun mulai dari tingkat ibtida'iyah hingga aliyah, baik yang masih ada maupun yang sudah hijrah ke alam baka, yang senantiasa bijak dalam menampilkan ketauladanan dan arif dalam mengarahkan muridnya bagaimana bersikap dan menempatkan diri dalam setiap situasi dan lingkungan serta piaui dalam mentransformasikan segenap kompetensi dan pengetahuan.
6. Kedua orang tua yang tulus menerlantarkan jiwa dan mentalitas putranya sehingga memudahkan upaya pencarian jati diri dan makna hidup yang hakiki secara arif dan mandiri.
7. Istri tercinta yang shalihah dan cerdas sebagai seorang wanita, dan senantiasa tulus berjihad dengan kepatuhan dan kasih sayangnya.

Demikianlah ungkapan terimah kasih yang bisa penyusun haturkan, semoga jasa baik semuanya menjadi amal baik yang akan mengantarkan ke pintu sorga. Hanya kepada Allah jualah penyusun mohon ampunan dan petunjuk dari segala khilaf dan nista.

Yogyakarta, Sabtu, 27 Mei 2006

Penyusun

H a s h i n
NIM: 99363754

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. EPISTEMOLOGI CIVIL SOCIETY : REKONSTRUKSI SEJARAH

DAN ARKEOLOGI KONSEP

A. Wawasan Konseptual dan Formulasi Wacana	21
B. Arkeologi Konsep dan Evolusi Wacana.....	31
C. <i>Civil Society</i> Sebagai Wacana Politik	48
D. <i>Civil Society</i> Sebagai Wacana Budaya	50
E. Karakteristik <i>Civil Society</i>	54
F. Visi Sosial <i>Civil Society</i>	56
G. Fungsi Dasar <i>Civil Society</i>	58
H. <i>Civil Society</i> dan Demokratisasi	60

BAB III. PARADIGMA CIVIL SOCIETY DALAM PERSPEKTIF PEMKIRAN

ABDURRAHMAN WAHID DAN NURCHOLISH MADJID

A. Abdurrahman Wahid: Sketsa Biografi dan Paradigma Pemikiran	66
1. Pesona Kepribadian Fenomenal	66
2. Potret Kehidupan dan Pergulatan Intelektual	69
3. Jejak Karir Sosial Kultural	73
4. Menapaki dan Menuruni Hirarki Struktural	76
5. Paradigma Pemikiran	80
6. Liberalisme Pemikiran	85
7. Produktivitas Intelektual	87
B. Wacana <i>Civil Society</i> dalam Perspektif Pemikiran	
Abdurrahman Wahid	89
1. Umat sebagai <i>Civil Society</i>	90
2. Utopisme Idealisasi Konstruk Sosial Islam	109
3. Islam Sebagai Sistem Sosial	117
4. Gerakan Kultural Sebagai Alternatif Pemberdayaan	123
5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Beragam Pendekatan	126
C. Nurcholish Madjid: Sketsa Biografi dan Paradigma Pemikiran	140
1. Performa Kepribadian	140
2. Spektrum Kehidupan dan Perjalanan Karir Sosial Intelektual	142
3. Tutup Usia	147
4. Paradigma Pemikiran	149
5. Anatomi Pemikiran	151
6. Produktivitas Intelektual	154

D. Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Pemikiran

Nurcholish Madjid.....	155
1. Pengertian Pokok	162
2. Masyarakat Madani dan Demokrasi	166
3. Masyarakat Madani dan Kebebasan	167
4. Masyarakat Madani dan Toleransi	170
5. Masyarakat Madani dan Pluralisme	175
6. Masyarakat Madani dan Hak Asasi Manusia	180
7. Masyarakat Madani dan Keadilan Sosial	184

BABIV: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PEMIKIRAN CIVIL SOCIETY

DAN MASYARAKAT MADANI DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA : KRITIK NALAR PEMIKIRAN DAN GERAKAN KULTURAL ABDURRAHMAN WAHID DAN NURCHOLISH MADJID DALAM MEMPERKUAT POSISI MASYARAKAT SIPIL

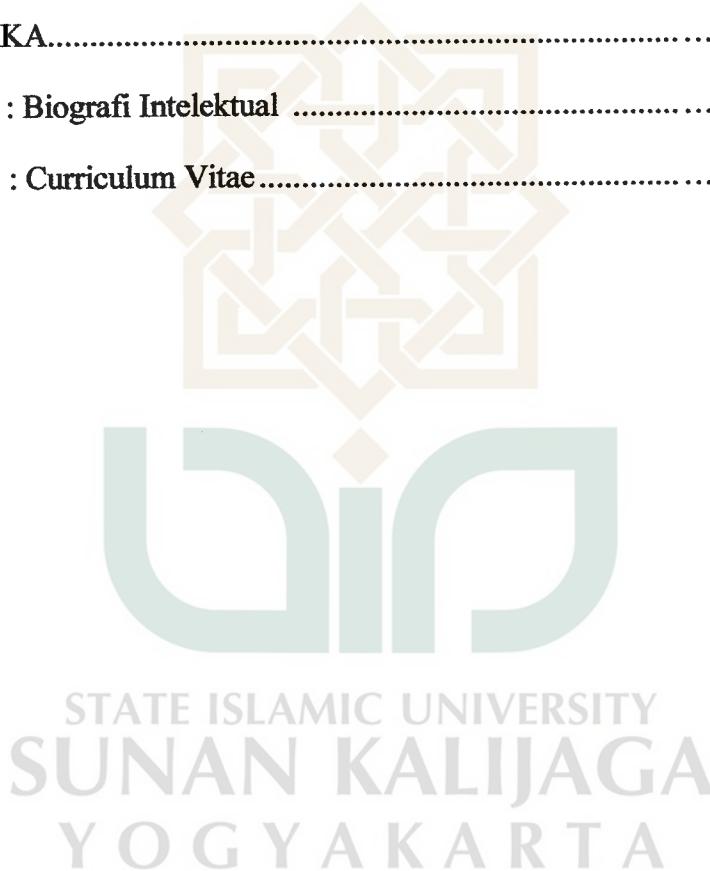
A. Konsistensi Abdurrahman Wahid dalam Mengimplementasikan Pemikiran

<i>Civil Society</i>	188
1. Transformasi Pemikiran <i>Civil Society</i> dalam Wacana Politik	188
2. Transformasi Pemikiran <i>Civil Society</i> dalam Wacana Budaya	211
3. Gerakan Transformatif dalam Kerangka Memperkuat <i>Civil Society</i>	221
4. Implikasi Gagasan Masyarakat Sipil	226

B. Konsistensi Nurcholish Madjid dalam Mengimplementasikan

Pemikiran Masyarakat Madani.....	230
1. Konsistensi dan Signifikansi Pemikiran Masyarakat Madani	230
2. Implikasi Pemikiran Masyarakat Madani	238

C. Kritik Nalar Pemikiran <i>Civil Society</i> dan Masyarakat madani :	
Analisis Teks dan Pertarungan Wacana	247
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	270
B. Saran-saran.....	274
DAFTAR PUSTAKA.....	275
LAMPIRAN I : Biografi Intelektual	I
LAMPIRAN II : Curriculum Vitae	III





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keruntuhan rezim otoriter Orde Baru menimbulkan perubahan-perubahan tatanan sosial kemasyarakatan, tidak terkecuali sektor kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan pola keberagamaan. Yang sangat krusial di sini menyangkut persoalan *nasionalisme*, *disintegrasi* dan *state nation* yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, hukum dan kemanusiaan.

Dinamika internal sosio-politik di Indonesia selama tiga dekade terakhir di era Orde Baru dianggap telah gagal membawa perubahan substansial dalam memperkuat partisipasi politik rakyat sebagai prasarat demokrasi. Gagalnya pemerintahan Orde Baru mengisyaratkan sebentuk ketidakmampuan dalam mewujudkan cita-cita pembentukan sebuah *modern nation state* di Indonesia. Jatuhnya rezim Orde Baru oleh massa rakyat yang tergabung dalam gerakan reformasi telah membawa optimisme tersendiri bagi masa depan demokratisasi di Indonesia. Gerakan reformasi menjadi tonggak sejarah bagi berakhirknya praktik-praktek dominasi, depolitisasi, hegemoni, kooptasi dan penetrasi yang dikembangkan rezim Orde Baru. Dalam konteks saat ini, negara kemudian tidak lagi menjadi representasi dari kekuasaan rezim yang represif dan otoriter, tetapi lebih merupakan sebuah ruang perebutan kepentingan. Negara saat ini harus lebih akomodatif terhadap masuknya berbagai kepentingan. Terbukanya ruang publik yang bebas ini memungkinkan munculnya

kembali aliran-aliran dan partai-partai politik yang berbasis ideologi, baik nasionalisme maupun religius. Kehadiran mereka bisa dimaknai positif sejauh mendorong laju demokratisasi dan mampu menjadi lahan persemaian bagi asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang berbasis *civil society*.¹

Umat Islam sebagai komunitas agama dan Indonesia sebagai negara merupakan dua entitas yang berbeda. Umat Islam secara kolektif atau individu memiliki sistem bertindak dan sistem hubungan sosial yang dibangun di atas *central value system* yang tersusun dalam ajaran syari'ah. Dari tata hubungan ini, maka terbentuklah sebuah "komunitas Islam", atau "masyarakat Islam".

Di sisi lain, Indonesia sebagai sebuah negara menempatkan masyarakat Islam sebagai warga yang menghendaki adanya sebuah sistem dan tata hubungan sosial kewarganegaraan. Pengertian dan posisi *ummah* yang tumpang tindih ini pada gilirannya akan menimbulkan *konflik structure of significance* dari keduanya. Bahkan tak jarang di antara gerakan dan perjuangan umat untuk mewujudkan *civil society*, agama dijadikan legitimasi untuk memenuhi kepentingan idealisme dan ambisi politik golongan dengan bahasa yang tidak arif dan toleran, yang mencerminkan eksklusivisme dan konservatisme golongan dengan dalih reformasi dan perubahan.

Dalam situasi seperti inilah setiap upaya pemberdayaan *civil society* akan dihadapkan pada tantangan kultural dan struktural sekaligus, yakni pada bagaimana mengarahkan kekuatan-kekuatan Islam pada suatu kondisi yang memperkuat basis kultural dan struktural bagi lahirnya *civil society*.

¹ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 1.

Diskursus mengenai *civil society* sebenarnya baru belakangan populer di Indonesia. Kemunculannya terkait erat dengan fenomena mutakhir mengenai kondisi sosial politik global dan meluasnya proses demokratisasi di seluruh dunia pada sekitar dasawarsa 1980-an, serta dinamika internal politik Indonesia. Fenomena itu berawal dari bangkitnya nasionalisme di Eropa timur dan Eropa tengah yang menandai tumbangnya rezim-rezim totalitari yang kemudian sisisul oleh arus demokratisasi di berbagai kawasan, mulai Amerika latin, tengah dan dan Asia. Wacana *civil society* kembali marak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi perubahan kondisi sosial politik yang disponsori oleh gerakan besar Reformasi. Seiring dengan proses perubahan ini, maka tercetuslah sebuah ide membentuk Masyarakat Madani dalam perspektif ke-Indonesia-an. Istilah Masyarakat Madani oleh para politikus dijadikan sebagai sebuah paradigma alternatif untuk membentuk negara yang demokratis, berkeadilan, dan mengayomi sendi-sendi kemanusiaan.

Di kalangan publik, *civil society* diinterpretasi dan diadaptasi dalam berbagai kosakata, di antaranya adalah masyarakat kewargaan,² masyarakat utama,³

² Istilah ini pernah diangkat dan digunakan dalam Seminar Nasional XII AAPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) dengan tema “Dimensi Kepemimpinan dalam masyarakat Kewargaan: Menuju Abad XXI”, di Kupang NTT, 24-26 Januari 1995. Artikel yang berkaitan dengan masyarakat kewargaan adalah tulisan M. Ryaas Rasyid “Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan” dan Riswanda Imawan “Rekrutmen Kepemimpinan dalam Masyarakat Kewargaan dalam Politik Malaysia”. Keempat artikel tersebut dimuat dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No.17 Tahun 1997.

³ M. DawamRahardjo, “Etos Masyarakat Utama”, dalam *Intelektual, Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekian Muslim*, cet. III (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 443-455. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Masyarakat Utama” yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang 21-22 Desember 1991.

masyarakat sipil,⁴ masyarakat madani,⁵ dan yang terakhir tetap menggunakan terminologi *civil society*,⁶ tanpa berupaya menterjemahkannya lagi sebagaimana yang

⁴ Misalnya sebagaimana yang dipakai dalam bukunya Dr. Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Sebelumnya, istilah "masyarakat sipil" juga dipakai untuk terjemahan karya Ernest Gellner, *Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals* (London: Penguin Group, 1994) dengan judul *Membangun Masyarakat Sipil: Prasarat Menuju Kebebasan* (Bandung: Mizan, 1995). Kata pengantar yang bagus terhadap buku tersebut ditulis oleh Aswab Mahasin dengan judul "Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukaddimah". Dari tulisan inilah Aswab Mahasin kemudian tercatat sebagai cendekiawan Muslim dari kalangan modernis yang turut serta mempopulerkan istilah masyarakat sipil, melebihi para cendekiawan Muslim modernis lainnya.

⁵ Istilah ini sering digunakan oleh kalangan intelektual Islam modernis, seperti Nurcholish Madjid, M. Dawam Raharjo, Amien Rais dan Azyumardi Azra. Kalangan intelektual Islam modernis menilai bahwa pilihan etimologis istilah "masyarakat madani" sebagai terjemahan dari kosakata *civil society* sesungguhnya lebih tepat, mengingat penggunaan istilah *civil society* dianggap kebarat-baratan dan tidak memiliki akar sejarah dalam tradisi Islam. kalangan Muslim modernis lebih cenderung melihat *civil society* sebagai konsep sosial yang berasal dari ideologi sekular dan jauh dari nuansa spiritual. Implikasinya, istilah masyarakat madani yang diperkenalkan Muslim modernis kemudian diasumsikan bukan sebagai terjemahan dari *civil society*. Sesungguhnya terdapat sebentuk perbedaan ideologis antara *civil society* dan masyarakat madani, sebab masyarakat madani memiliki landasan spiritual dan religius karena kembali ke teks-teks agama. Sementara landasan spiritual dan religius ini tidak ditemukan dalam konteks wacana *civil society*. Persoalannya kemudian adalah mengapa secara konseptual teoretis kalangan Muslim modernis lebih menyukai istilah "masyarakat madani"? Bahwa rumusan masyarakat madani sesungguhnya mengandaikan terjadinya kemitraan antara negara dan masyarakat. Konsekuensinya, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Berbeda dengan konsep masyarakat sipil yang sarat dengan nuansa kritik dan bahkan oposisi terhadap negara, masyarakat madani relatif lebih bersikap akomodatif bahkan menjadi mitra negara, karena negara dalam struktur bangunan masyarakat madani dipandang sebagai salah satu aktor penting untuk membangun suasana demokratis. Rumusan masyarakat madani seperti inilah yang dipandang tepat oleh kalangan Muslim modernis untuk dikembangkan, mengingat posisi Muslim modernis sendiri yang saat itu menjadi bagian dari sistem atau pemegang kekuasaan di negeri ini. Di luar itu, rumusan masyarakat madani yang diajukan oleh Nurcholish Madjid harus diberi perhatian secara lebih luas. Karena melalui rumusan Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society* akhirnya dapat diterima banyak kalangan di Indonesia. Bahkan, rumusan Nurcholish inilah yang menandai titik akhir dari berbagai usaha merumuskan visi tentang *civil society* di Indonesia. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia", *Paramadina*, Vol. 1, No. 2, 1999, hlm. 7-12.

⁶ Misalnya AS. Hikam yang konsisten menggunakan istilah *civil society*, dalam kedua bukunya; *Demokrasi dan Civil society* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996) dan *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan civil society*, (Jakarta: Erlangga, 2000). Dalam kedua karyanya, Hikam telah menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai *civil society*. Hikam memaparkan bahwa dengan tidak menerjemahkan dari terminologi aslinya, *civil society* yang merupakan wacana warisan dari Barat, akan lebih mendekati subtansinya. Beragam pengistilahan terhadap *civil society* pada hakekatnya secara substansi bermuara pada perlunya penguatan masyarakat dalam sebuah lingkup kekuasaan negara untuk mengimbangi sekaigus mengontrol kebijakan negara (pemerintah) yang cenderung memposisikan warga negara sebagai obyek yang lemah.

tetap digunakan dalam penelitian ini. Di antara berbagai terminologi tersebut, dapat ditemukan dua kecenderungan pemikiran dalam wacana *civil society* di Indonesia, yakni “Masyarakat Sipil” yang disintesakan dari pemikiran filsafat sosial Barat dan “Masyarakat Madani” yang diderivasikan dari pemikiran sosial politik Islam.

Konsep “masyarakat sipil” yang dilansir oleh kaum tradisionalis merupakan konsep sosial yang mengandaikan adanya ruang publik yang bebas dari intervensi negara sehingga masyarakat memiliki kekuatan resistensif terhadap negara yang hegemonik. Konsep masyarakat sipil dimaknai sebagai kekuatan masyarakat vis-vis negara (pemerintahan), tanpa berpretensi mengaitkannya dengan nilai-nilai, basis, tradisi dan cita-cita Islam. Masyarakat sipil kemudian dipahami sebagai upaya penguatan masyarakat melampaui sekat sektarianisme dan primordialisme. Jadi, konsep masyarakat sipil sangat menggarisbawahi masyarakat sebagai lawan negara, karena pada awalnya ia dibangun di atas pengalaman negara yang menindas rakyat.

Adapun pandangan Abdurrahman Wahid mengenai masyarakat sipil merujuk pada konsepsi *civil society* yang menitikberatkan pada kemandirian masyarakat. Menurutnya, kelompok atau gerakan manapun bisa disebut sebagai gerakan *civil society* selama orientasi pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan posisi masyarakat dalam kehidupan bernegara.⁷ Penggunaan terminologi “masyarakat sipil”

⁷ Abdurrahman Wahid juga memaparkan bahwa sejarah Islam Indonesia sesungguhnya telah memiliki akar kuat bagi pembentukan *civil society* meskipun fungsi sosialnya belum tampak secara maksimal. Sejarah membuktikan bahwa gerakan Islam masih banyak yang bersikap oportunistik, bergantung pada pemerintah, dan kurang mempunyai sikap ideologi yang jelas. Hal ini tampak dari lemahnya visi transformatifnya. Akan tetapi Realitas mutakhir menunjukkan maraknya gerakan Islam yang diwakili ormas-ormas keagamaan dalam melaksanakan pemberdayaan *civil society* dalam kerangka memerlukan fungsi agama sebagai instrumen transformasi sosial, meskipun sebagian besar dari mereka tampaknya masih belum memiliki wawasan transformatif yang memadai akibat orientasi pergerakan yang tidak mengarah pada kepentingan masyarakat. Abdurrahman Wahid, “Islam dan Pemberdayaan *Civil Society*: Pengalaman Indonesia”, *Halqoh*, Edisi No. 6/1998, hlm. 22.

untuk konsep *civil society* memiliki makna khusus bagi Abdurrahman Wahid sejalan dengan pengalaman dan perjuangannya dalam konstelasi politik Orde Baru. Pemberian makna seperti ini dikaitkan dengan usaha merumuskan identitas dan visi sosial Abdurrahman Wahid tentang gerakan sosial dalam rangka berhadapan dengan kuatnya hegemoni negara.⁸ Karir dan pengalaman politiknya yang tidak mulus dan mengenakkan, menjadi alasan yang kuat untuk mengembangkan agenda masyarakat sipil. Pengalaman yang tidak mengenakkan tersebut sebagian besar berkaitan dengan sikap pemerintah Orde Baru yang kurang memberi tempat dan kesempatan kepadanya dan NU yang dipimpinnya dalam proses-proses politik.⁹ Dengan menyadari posisi seperti ini, Abdurrahman Wahid kemudian bertekad untuk mengambil peran di luar orbit kekuasaan. Hal ini dilakukan Abdurrahman Wahid

⁸ Sebagai sesuatu yang bermakna, konsep masyarakat sipil tentu dijadikan Abdurrahman Wahid sebagai *guideline* perjuangannya. Selama pemerintahan Orde Baru, ia tidak mendapatkan kesempatan dan peran yang signifikan dalam tata penyelenggaraan negara. Bahkan gerak dan karir politiknya selalu dipinggirkan, dan hak-hak sosial politiknya juga dirampas oleh pemerintah, sehingga praktis ia kehilangan peran sosial politiknya untuk ikut serta menempati posisi strategis di institusi pemerintahan (birokrasi). Dalam suasana yang demikian inilah, maka ia memerlukan sebuah paradigma perlawanannya terhadap negara. Sementara konsep yang menawarkan perlawanan terhadap negara yang tersedia adalah paradigma masyarakat sipil. Maka untuk mengartikulasikan perlawanannya, ia kemudian menggunakan perspektif masyarakat sipil. Karenanya, sangat wajar bila proses pemahaman terhadap wacana masyarakat sipil yang dikembangkannya kemudian berbeda jauh dengan apa yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid. Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk, *Islam dan Civil society; Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 147-149.

⁹ Dalam kondisi yang tidak mengenakkan tersebut, wacana *civil society* kemudian menjadi dipahami sebagai masyarakat non-negara dan selalu tampil berhadapan dengan negara. Dalam kondisi dimana negara (Orde Baru) begitu kuat sementara masyarakat begitu lemah, maka wacana *civil society* kemudian menemukan momentumnya yang begitu kuat. Munculnya gerakan sosial baru sebagai pilar *civil society* merupakan salah satu bukti kuatnya momentum tersebut. Kebangkitan wacana *civil society* dalam komunitas Abdurrahman Wahid sendiri pada dasarnya diawali dengan momentum kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984. Kembali ke Khittah bukan semata-mata diartikan sebagai upaya meninggalkan kehidupan politik, tetapi lebih sebagai perubahan orientasi gerakan politik. Strategi politik yang demikian pada akhirnya menempatkan Abdurrahman Wahid dalam posisi yang tidak mengenakkan karena selalu "berhadapan" dengan pemerintah. Sebagai implikasinya Abdurrahman Wahid bersama NU-nya kemudian menjadi semakin terpinggir dari pusat kekuasaan. Akan tetapi, justru karena keterpiggiran itu, peran Abdurrahman Wahid melalui NU sebagai embrio tumbuhnya *civil society* di Indonesia kemudian menjadi semakin mantap. Ellyasa KH. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Jogjakarta: Lkis, 1994), hlm. xii

dengan cara memposisikan dirinya sebagai motor pergerakan sosial yang berfungsi melakukan kontrol sosial terhadap negara. Dengan semangat seperti ini, penggunaan istilah “masyarakat sipil” bagi Abdurrahman Wahid merupakan wujud dari artikulasi politiknya yang berusaha memposisikan diri otonom dari negara, sekaligus sebagai *counter hegemony* terhadap besarnya dominasi negara.

Adapun pemikiran “masyarakat madani” yang diusung oleh kalangan modernis sesungguhnya merupakan satu upaya untuk menterjemahkan *civil society* sebagai kekuatan masyarakat dalam konteks nilai, tradisi dan budaya Islam, dengan merekonstruksi sejarah sosial masyarakat Madinah pada masa Nabi. Dalam konteks ini, masyarakat Madinah digambarkan sebagai sebuah potret masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur dan berakhlaq karimah.¹⁰ Berbeda dengan konsep masyarakat sipil, kekuatan masyarakat dalam konsep masyarakat madani tidaklah dihadapkan pada kekuasaan negara, malainkan saling bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai luhur, yakni keadilan, kesejahteraan dan demokrasi.

Pandangan Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani dirumuskan dengan mengadopsi perilaku umat *Salaf al-Shalih* dalam rangka membentuk sebuah negara bangsa yang universal. Nurcholish Madjid kemudian memberikan landasan normatif dari sejarah Islam klasik dengan menunjukkan kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi sebagai *prototype* sebuah masyarakat modern yang berperadaban. Dengan penjelasan ini, maka Nurcholish Madjid telah melakukan

¹⁰ Menilik pengalaman sosio-historis Islam, masyarakat madani merupakan representasi dari masyarakat Madinah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW, yang oleh Robert N. Bellah, sosiolog agama terkemuka, disebut sebagai sebuah tatanan masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya tergolong sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zamannya. Indikator modernitasnya antara lain tercermin dari penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai pluralitas, inklusivisme dalam beragama dan kebebasan individu. Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, (New York: Harper and Row, 1976), hlm. 150.

sofistikasi konseptual melalui justifikasi historis keagamaan dalam kerangka merumuskan masyarakat madani. Jadi, yang dimaksud dengan Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban sebagaimana yang dibangun Nabi di Madinah. Yakni masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah. Taqwa dalam arti semangat ketuhanan, baik semangat *rabbaniyyah* (QS. Ali Imran: 79)¹¹ maupun semangat *ribbiyah* (QS. Ali Imran: 146).¹² Menurut Nurcholish Madjid, inilah *habl min al-Allah*, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Jika semangat *rabbaniyyah* atau *ribbiyah* tersebut dihayati secara tulus dan sejati akan memancar dalam semangat kemanusiaan, yakni semangat *insaniyah* atau *basyariyah*, dimensi horizontal hidup manusia, *habl min al-nas* yang memancarkan semangat perikemanusiaan dalam berbagai bentuk interaksi sosial sesama manusia yang berbudi luhur. Dalam konteks ini, maka jelas sekali bahwa Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berbudi luhur atau berakhlaq mulia, mengacu pada pola kehidupan masyarakat berkualitas dan berperadaban (*mutamaddin, civility*).¹³

Pilihan terminologi “masyarakat madani” merupakan cerminan dari visi sosial Nurcholish Madjid dalam merumuskan masyarakat ideal yang dicita-citakan. Konsep masyarakat madani yang dikembangkan Nurcholish Madjid relatif lebih akomodatif

¹¹ QS. Ali Imran: 39. Artinya: “Tidak layak bagi seseorang yang diberi Allah kitab, hikmah dan kenabian berkata kepada semua orang “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah“ melainkan seharusnya berkata “Hendaklah kamu menjadi orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan dan mempelajari al-Kitab.

¹² QS. Ali Imran: 146. Artinya; *Dan banyak Nabi yang berperang bersama para pengikutnya yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah lantaran bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak pula mereka merasa lesu lantas menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.*

¹³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi.*, hlm. 167.

terhadap negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah Orde Baru. Konsep ini dirumuskan sebagai tatanan sosial politik yang mengandaikan keterlibatan peran pemerintah atau negara. Negara dalam konteks ini tidak diposisikan berhadapan secara diametral dengan warganya. Negara dalam perspektif masyarakat madani dipandang sebagai salah satu aktor penting untuk mewujudkan situasi dan kondisi ketatanegaraan yang demokratis. Nurcholish Madjid memandang negara dalam arti yang positif, tidak sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang dapat diajak bersama-sama menumbuhkan masyarakat madani, sehingga demokrasi bisa dibangun bersama-sama. Nurcholish Madjid kemudian menilai bahwa kerja sama dengan negara sesungguhnya bisa dipersepsikan sebagai upaya keras untuk merealisasikan cita-cita masyarakat madani dengan menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang dan saling melengkapi antara negara dan warganya. Kenyataan ini menunjukkan posisi Nurcholish Madjid dengan seperangkat sejarah perjuangan aspirasi politik Islamnya yang jauh dari kesan resistensif terhadap negara, melainkan saling melengkapi dan memberi dukungan bagi masing-masing kepentingan.¹⁴ Dengan demikian, Pilihan Nurcholish Madjid atas terminologi “masyarakat madani” dalam kondisi ruang, waktu serta posisi seperti ini sangatlah bisa dipahami, sekaligus pada gilirannya akan memberikan warna lain dan memuat pemaknaan yang berbeda terhadap konsep *civil society* yang dikembangkan di negeri ini.

Dalam konteks formulasi pemikiran *civil society* di atas, perbedaan terminologi tentu saja tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan transliterasi ataupun konotasi. Perbedaan ini lebih didasarkan atas keterkaitan dengan

¹⁴ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun*, hlm. 37.

pengalaman sosial politik dan konfigurasi pemikiran masing-masing. Bahwa konsep masyarakat madani yang cenderung moderat dan akomodatif—berbeda dengan konsep masyarakat sipil yang lebih radikal dan progesif—mendorong Abdurrahman Wahid untuk mensinyalirnya sebagai satu bentuk oportunistis. Dua kutub definisi *civil society* yang berseberangan ini sangatlah masuk akal, mengingat pengalaman politik Abdurrahman Wahid yang jauh dari kekuasaan, sementara pengalaman Nurcholish Madjid justru sangat dekat sekali dengan lingkar kekuasaan. Namun demikian, meskipun keduanya berbeda dalam memberikan pemaknaan dan menerjemahkan pemikiran *civil society*, akan tetapi sesungguhnya pemikiran keduanya sama-sama mendekati fungsi *civil society* sebagai prasarat demokratisasi.

Dalam konteks pemikiran *civil society*, pilihan atas pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sesungguhnya lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya menempati posisi terdepan dalam pembangunan demokrasi dan perkembangan pemikiran sosial politik Islam di negeri ini, termasuk perumusan gagasan penguatan *civil society*. Karir politik, kiprah sosial serta karya-karya intelektual keduanya mempunyai peranan besar dalam upaya demokratisasi dan pemberdayaan *civil society*. Pilihan atas keduanya juga semata-mata didasarkan atas alasan bahwa pemikiran-pemikiran keduanya telah banyak melakukan kritik terhadap *status quo*, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sehat serta pola hubungan kekuasaan yang cenderung represif, hegemonik dan dominan. Keduanya merupakan sosok figur yang sama-sama berangakat dari latar belakang sosial, intelektual serta gerakan demokrasi dan Islam di Indonesia. Keduanya tumbuh dan besar dalam rahim umat Islam Indonesia yang dipenuhi oleh ketidakberdayaan dalam

berinisiatif menghadapi kehadiran Indonesia baru dengan tatapan Islam yang lebih responsif dan substantif.¹⁵

Secara spesifik, dapat dikemukakan bahwa sosok Abdurrahman Wahid yang menjadi representasi muslim tradisionalis adalah figur moralis demokrat yang telah mengalami transformasi pemikiran dari tradisionalisme sampai modernisme Islam.¹⁶ Sementara figur Nurcholish Madjid yang menjadi representasi komunitas muslim modernis merupakan sosok yang tidak bisa dinafikan dalam realitas pembentukan dan pematangan wacana pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia.

Dalam konteks dua kecenderungan di atas, pencarian konsep, rekonstruksi sejarah, relevansi pemikiran serta perjuangan *civil society* di negeri ini kemudian menemukan titik signifikansinya. Pada titik ini pula sesungguhnya motivasi penyusunan karya ini terlahir. Maksud penelitian semata-mata diarahkan pada upaya membedah pemikiran “masyarakat sipil” Abdurrahman Wahid dan “masyarakat madani” Nurcholish Madjid dengan merunut kembali akar historis yang memproduksi kedua konsep mereka. Dan mengingat konsep *civil society* bukanlah

¹⁵ Dan di antara pengaruh sosiologis dari pemikiran keduanya adalah; *Pertama*, dalam konteks hubungan antar agama. Pemikiran keduanya yang memuat perhatian utama pada humanitarianisme, pluralisme, dan demokrasi secara tidak langsung telah menyebabkan pola pandang yang lebih kompromis dan toleran antarwarga masyarakat. *Kedua*, dalam konteks demokratisasi dan pengembangan *civil society*. Partisipasi aktif keduanya dalam mengkampanyekan Islam sebagai agama pembebasan yang peduli pada reformasi sosial telah memberikan sumbangan yang besar dalam proses pemberdayaan *civil society*. *Ketiga*, kontribusi pemikiran keduanya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada kian membaiknya pemahaman umat Islam terhadap relasi Islam dan negara. Syamsul Bakri dan Mudhofir, *Jombang Kairo Jombang Cicago.*, hlm. 122-138.

¹⁶ Dalam penelitian ini katagori tradisionalis-modernis lebih didasarkan pada afiliasi politik dan fragmentasi sosial. Hal ini penting mengingat fakta bahwa perkembangan sosial politik Indonesia masa Orde Baru ditandai dengan proses depolitisasi dan deideologisasi yang sangat intensif, sehingga katagori tradisionalis-modernis dalam pemikiran dan praktik keagamaan tidak bisa lagi sepenuhnya digunakan. Untuk itu, dalam penelitian ini, katagori tersebut sepenuhnya lebih didasarkan pada aspek sosiologis-politik, bukan pada pola keberagamaan.

proses yang final atau sudah jadi. Maka, untuk memahaminya terlebih dahulu harus dianalisis dengan pendekatan arkeologis.¹⁷ Pendekatan arkeologis dimaksudkan untuk menelaah kembali formulasi *civil society* dan melacak kembali akar pemikiran yang menjadi rujukan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid dalam merumuskan visi masyarakat sipil dan masyarakat madani. Dalam konteks saat ini, pendekatan arkeologis dapat dipahami sebagai upaya menghidupkan kembali ruh pemikiran *civil society* di era reformasi yang diasumsikan sebagai era eksperimentasi demokrasi.

Berbagai kajian pemikiran sosial politik Islam di Indonesia memang telah banyak memperbincangkan teori sosial dan konsep-konsep politik modern yang erat kaitannya dengan *civil society*, seperti kajian mengenai demokrasi, hubungan negara dengan masyarakat, maupun *civil society* itu sendiri. Namun demikian, di antara kajian yang ada yang berkenaan dengan wacana *civil society* selama ini tampaknya lebih bersifat teoretis dan banyak sekali kekurangan data empirik dan praktik historisitasnya, sehingga masih membuka banyak kemungkinan untuk melakukan kajian yang secara khusus membahas gagasan dan pemikiran sosial politik Islam yang mendorong transformasi ke arah *civil society*. Maka, dalam kerangka kajian ini, yang perlu di fokuskan kemudian adalah persoalan transformasi nilai, prinsip-prinsip serta elemen-elemen yang menjadi komponen inti dari konfigurasi *civil society*, di antaranya adalah pluralisme, inklusifisme, humanisme, dan egitarianisme.

¹⁷ Secara terminologi, Arkeologi berarti penyelidikan terhadap benda-benda purbakala dengan menelaah sisa-sisa peninggalannya. Arkeologi pemikiran berbeda dengan sejarah ide karena yang pertama bersifat sistemik dan menitikberatkan analisisnya pada proses terbentuknya ide-ide, pengetahuan atau pemikiran, sementara yang kedua lebih identik dengan “sejarah opini” yang bersifat individual. Dahlan Al Barry, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jogjakarta: Arkola, 1994), hlm. 39.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan narasi latar belakang di atas, maka perlu kiranya memberi batasan pada substansi permasalahan supaya fokus penelitian tidak menjadi meluas dan memanjang. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sesungguhnya paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid berkenaan dengan formulasi *civil society* ?
2. Sejauh mana signifikansi, transformasi dan implikasi gagasan *civil society* dalam kerangka praktis kehidupan sosial politik dinegeri ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sekaligus menafsiran pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mengenai *civil society* sebagai landasan teoretis bagi upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Mengeksplorasi setiap upaya transformasi, tingkat signifikansi serta implikasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mengenai *civil society*?

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, yakni:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sosiologi dan politik Islam, dalam kerangka mengantisipasi berbagai problemkebangsaan kontemporer.
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup berbangsa dan bernegara terutama karena kontribusi pemikiran ini berpretensi untuk mencari format dan konfigurasi pemikiran sosial politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah kajian yang berusaha mengupas wacana *civil society* dalam pemikiran seorang tokoh, maka kiranya perlu data pendukung yang relatif memadai dari berbagai kajian dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Ada baiknya literatur yang mempunyai keterkaitan dengan wacana sosial politik Islam akan tetap menjadi rujukan penelitian ini. Di antaranya adalah karya Ahmad Baso *Civil Society Versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran “Civil society” dalam Islam Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999). Buku ini memetakan respon cendekiawan muslim terhadap wacana *civil society* di Indonesia. Titik relevansi buku ini terletak pada perangkat analis yang digunakannya, yakni arkeologi pemikiran yang dalam pembacaan penulisnya tidak diandaikan sebagai upaya menelaah kembali atau menelusuri akar pemikiran namun lebih ekstrem lagi, sebagai upaya dekonstruksi.

Hendro prasetyo, Ali Munhanif, dkk dalam buku *Islam dan Civil society: Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002) mencoba mendeskripsikan alasan-alasan dibalik pemaknaan *civil society* oleh kelompok Muslim tradisionalis dan modernis, dengan tanpa berpretensi untuk memihak, memberikan opini atau bahkan menjustifikasi. Sisi relevansi dari buku ini terletak pada kajian mengenai upaya kaum cendekiawan muslim dalam memperjuangkan aspirasi dan cita-cita Islam, dengan merumuskan kembali agenda penguatan *civil society* sebagai basis menuju idealitas kehidupan bernegara yang demokratis.

Muhammad A.S. Hikam dalam buku *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society* (Jakarta: Erlangga, 2000) berusaha memaparkan lebih jauh mengenai

esensi dan prasarat bagi terwujudnya *civil society*. Yang menjadi titik relevansi dari buku ini adalah aspek analisis pemetaan seluruh proses pemberdayaan *civil society* di Indonesia dengan tetap mengacu pada sejarah konseptualnya.

Sufyanto dalam skripsinya, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001) berusaha memotret secara jeli pemikiran Nurcholish Madjid tentang "Masyarakat Madani". Pembahasannya menggunakan pendekatan hermeneutik sosial, dengan menganalisis metodologi pemaknaan terhadap suatu konsep atau pemikiran. Titik relevansi dari buku ini adalah pemaparannya mengenai konsep "masyarakat madani" yang dikaji secara terperinci mulai dari prinsip sampai akar historis masyarakat madani.

Nurcholish Madjid dalam buku *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997) mencoba menguraikan konsep kemasyarakatan dalam perspektif Islam. Pembasannya ditekankan pada penanaman religiusitas masyarakat. Sisi relevansi dari buku ini terletak pada uraian mengenai prasarat mewujudkan masyarakat madani.

Buku *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Jogjakarta: LkiS, 1994) merupakan ontologi tulisan mengenai upaya menguatkan basis massa *civil society* yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam konteks penyelenggaraan negara yang hegemonik. Relevansi dari buku ini terletak pada pemaparan mengenai sepak terjang Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan posisi dan daya tawar *civil society*.

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan pembahasan buku-buku diatas. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan lebih diarahkan pada visi dan paradigma pemikiran sosial politik Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang berkenaan dengan wacana *civil society* baik dalam dataran teori maupun implementasi.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai sebuah konsep, *civil society* lahir dari proses sejarah dan peradaban masyarakat Barat. Di tempat asalnya, Eropa Barat, konsep ini sudah lama tidak banyak dibicarakan. *Civil society* kembali mengemuka ketika gerakan solidaritas di Polandia pimpinan Lech Walesa melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jenderal Jaruzelski. Dalam perlawanan tersebut, gerakan solidaritas memakai konsep *civil society* sebagai dasar sekaligus arah perjuangan dengan tekanan utama pada perlawanan terhadap otoritarianisme negara. Pola yang dipakai solidaritas ini menjalar ke berbagai negara Eropa timur lain, seperti bekas Chekoslovakia, seiring dengan runtuhnya rezim komunis di Uni Soviet. Keberhasilan dari gerakan-gerakan tersebut kemudian menjadi pemicu ramainya perbincangan *civil society* di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara dan Eropa Barat sendiri.¹⁸

Secara historis, konsep *civil society* berakar kuat dalam pengalaman sosial Eropa Barat. Inti dari konsep *civil society* adalah penolakan terhadap otoritarianisme. Wujud *civil society* dapat ditemukan pada episode-episode tertentu dalam sejarah Eropa. Misalnya, pada masa kerajaan Romawi pada saat kekuasaan dipegang oleh beberapa tangan, yakni raja, bangsawan, dan penduduk kota. Ketiganya memiliki kekuasaan relatif yang sanggup menangkal terjadinya hegemoni atau dominasi antara satu kekuasaan terhadap yang lain. Masing-masing pihak memiliki kekuatan tawar-menawar, sehingga mekanisme kontrol kekuasaan berjalan baik.¹⁹

¹⁸ John A. Hall, "In Search of Civil Society" dalam John A. Hall (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison* (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 31.

¹⁹ Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil society*, hlm. 3.

Civil society merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut intrinsiknya. *Civil society* memiliki karakteristik yang terdapat juga dalam konsep manusia sebagai individu. Jika individu merupakan ruang pribadi, maka *civil society* merupakan ruang publik. Karenanya, dalam konsep *civil society* juga harus terdapat kebebasan, kesederajatan, dan nilai-nilai lain yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan dan keseimbangan.

Sejalan dengan penekanan *civil society* pada masalah pengimbangan kekuasaan, maka persoalan proses komunikasi dan distribusi wewenang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai indikator, dapat ditunjukkan bahwa jika keadaanya semakin berimbang, maka pelaksanaan konsep *civil society* akan semakin dekat atau kongkrit. Hal ini dapat dilihat dalam perwujudan *civil society*, yakni asosiasi atau organisasi yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan persipatif baik dalam dataran wacana maupun praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan maasalah kemasyarakatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain dipandang memiliki kapasitas sebagai kekuatan pengimbang (*balancing force*) dari kecenderungan-kecenderungan dominatif dan intrensif negara, *civil society* juga mampu melahirkan kekuatan kritis reflaktif (*reflective force*) di dalam masyarakat.²⁰

Dalam kaitannya dengan Negara, paling tidak *civil society* dapat melakukan salah satu dari tiga fungsi pokoknya. *Pertama*, *civil society* berdiri sebagai perisai dari perilaku negara yang hegemonik. *Kedua*, jika negara tidak hegemonik, *civil society* tampil sebagai mitra negara dalam memenuhi kepentingan publik. *Ketiga*, jika

²⁰ Karakteristik masyarakat yang seperti ini dididentikkan Robert D. Putnam sebagai bentuk dari *civic traditions* atau bisa juga disebut sebagai *civic culture* yang ditemukan dalam penelitiannya terhadap masyarakat Italia. Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton Universit Press, 1993), hlm. 73.

kehidupan publik telah diakomodasi, maka *civil society* dapat memainkan fungsinya secara komplementer, yang muncul untuk melengkapi kepentingan masyarakat.

Adapun konsep masyarakat madani pada hakikatnya adalah sebuah spektrum reformasi total terhadap masyarakat yang tidak kenal hukum (*lawness*). Masyarakat madani, yang mengandung konotasi masyarakat berperadaban adalah masyarakat yang mempunyai semangat keimanan kepada Tuhan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia. Karena itu, konsep masyarakat madani mengandaikan sebuah tatanan sosial kemasyarakatan yang berdiri tegak di atas prinsip keadilan di seluruh sektor kehidupan.

Masyarakat Madani dikenal pula dengan masyarakat yang menjamin kebebasan dalam keyakinan religius, moral dan politik. Konsep masyarakat madani juga menegaskan bahwa kontrol sosial tidaklah mungkin terselenggara dalam sebuah tatanan sosial yang tertutup. Kegiatan “demi kebaikan”, dengan sendirinya berdimensikan kemanusiaan, karena berlangsung dalam hubungan baik untuk masyarakat. Apalagi jika kegiatan tersebut itu dilakukan melalui penggunaan kekuasaan, maka tidak dapat dibiarkan berlangsung dengan mengabaikan pandangan, penilaian dan pandapat masyarakat. Dengan demikian, ide pokok masyarakat madani sesungguhnya dapat digambarkan sebagai sebuah tatanan sosial yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi, melainkan secara kolektif, dan tidak pula oleh prinsip-prinsip *ad hoc* yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar bersama.²¹

²¹ Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 590.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama.²²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitik, yakni berusaha menggambarkan konsepsi *civil society* sebagai *grand concep*-nya.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, yang berusaha menganalisis realitas sosial yang mempengaruhi corak pemikiran seseorang.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri data primer, yakni karya-karya kedua tokoh maupun data skunder yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang ada akan dikelola kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif, yakni dengan cara menjelaskan data-data yang bersifat khusus untuk dipaparkan kemudian dalam bentuk general.²³

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hlm. 10; Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42.

²³ Noeng Muhamad, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Rake Saras, 1996), hlm. 55.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini gambaran penyusunan skripsi akan dijelaskan secara garis besar dengan menempatkannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini merumuskan tinjauan secara umum, yang materinya meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan tinjauan epistemologi mengenai tema pokok yang dikaji. Uraianya meliputi formulasi teoretis konseptual dan akar historis *civil society*.

Selanjutnya bab tiga mengetengahkan paradigma pemikiran tokoh berkenaan dengan wacana *civil society*. Pemaparannya dilatar belakangi oleh sketsa biografi kedua tokoh kemudian dilanjutkan dengan pemaparan visi dan karakteristik pemikiran mereka berkenaan dengan tema *civil society*.

Bab empat merupakan bab yang secara spesifik mengupas analisis terhadap paradigma pemikiran kedua tokoh berkaitan dengan kerangka konsep dan teori yang dirumuskan. Fokus pembahasannya diarahkan pada problematika empirik disepatar wacana *civil society* meliputi serangkaian upaya transformasi wacana *civil society* dengan melihat sejauh mana signifikansi dan implikasi dari pemikiran keduanya dalam konteks sosial dan politik di negeri ini. Penelitian ini selanjutnya ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan sebagai temuan akhir dari penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi penelitian lebih lanjut berkenaan dengan wacana ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh narasi yang telah dideskripsikan di muka, dapatlah kemudian ditarik seutas benang merah bahwa *civil society* sesungguhnya merupakan konsep sosial di negara-negara berkembang yang otoriter, represif, tiran dan anti-demokrasi. Dan ketika sebuah negara sudah sampai pada tarap yang maju dan nilai-nilai demokrasi sudah dipraktekkan dengan baik, maka orang yang mempromosikan *civil society* tak ubahnya seperti *crying in the witherness* (berteriak di tengah rimba raya) yang tiada guna karena tidak akan ada orang yang tertarik untuk menanggapinya. Dari sini bisa dipahami jika wacana *civil society* di Indonesia pada era 1990-an terlihat begitu marak.

Civil society, sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya, pada dasarnya memiliki tiga ciri utama; *Pertama* adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas (*free public sphere*) sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. *Ketiga*, adanya kemampuan untuk membatasi kekuasaan negara supaya tidak memiliki kecenderungan interventionis. Jadi, pengertian *civil society* secara sederhana sesungguhnya dapat dipahami sebagai sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang otonom atau independen, dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan negara,

memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, dan mempunyai lembaga atau asosiasi atau organisasi sosial independen yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Dalam konteks pemikiran Abdurrahman Wahid, *civil society* diberi batasan dengan cukup sederhana sebagai gerakan atau kelompok yang orientasi pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan posisi masyarakat, dalam arti memperjuangkan transformasi sosial agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada negara. Pandangan Abdurrahman Wahid yang demikian tampaknya memiliki kemiripan dengan pandangan Gramscian-Tocquevillian, yang lebih menekankan pada kemandirian masyarakat dalam hubungan dengan negara dengan melakukan *counter culture* terhadap ideologi, pemikiran maupun paham keagamaan yang kontra produktif dengan demokratisasi dan *civil society*. Di sisi yang lain, pandangan Abdurrahman Wahid tersebut juga memiliki kesamaan visi dengan gagasan Habermas dan Hannah Arendt tentang penciptaan *the public sphere*.

Pandangan Abdurrahman Wahid tersebut tentu berbeda dengan pandangan Nurcholish Madjid dalam mengagwas masyarakat madani yang meskipun bernuansa Hegelian namun sebenarnya lebih berorientasi pada penciptaan kelas menengah sebagai basis pemberdayaannya. Dalam beberapa hal, pandangan Nurcholish Madjid ini ternyata tidak cukup arif terhadap masyarakat tradisional, etnik dan budaya lokal, karena lebih bernuansa keislaman dan kemodernan. Disamping bias kelas, pandangan tersebut juga lebih mementingkan agenda Islam daripada agenda nasional. Hal ini karena pandangan Nurcholish Madjid tersebut diarahkan pada upaya menempatkan masyarakat madani sebagai proyeksi sekaligus ekspektasi konfigurasi masyarakat

Islami yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Berbeda sekali dengan asumsi yang dibangun Abdurrahman Wahid ketika sampai pada konstruksi masyarakat Islami. Bagi Abdurrahman Wahid, mendirikan masyarakat Islam sesungguhnya sama saja dengan hanya melayani komunitas sendiri dan pada saat yang sama juga berarti berlaku diskriminatif terhadap kelompok lain, diluar komunitas sendiri. Abdurrahman Wahid menilai bahwa pilihan pandangan seperti ini tentu sangat kontra produktif dengan nilai-nilai masyarakat madani itu sendiri sekaligus bertentangan juga dengan semangat transformatif Islam sebagai agama perbaikan dan pengayom seluruh alam.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapatlah dikatakan kemudian bahwa pertarungan antara wacana masyarakat sipil dengan masyarakat madani sesungguhnya masih berada dalam dataran pertarungan ideologis dan simbolik, yakni pertarungan untuk memperebutkan simbol-simbol agama, dan belum sampai pada level perdebatan intelektual yang memuaskan. Hal ini antara lain disebabkan karena pemikiran spekulatif dan filsafat kurang berkembang di kalangan umat Islam. Begitu pula kritik dan berfikir bebas juga kurang begitu dihargai. Kondisi ini diperparah lagi dengan iklim keberagamaan yang masih tergolong "irrasional" serta struktur masyarakat yang masih tersekat-sekat dalam identitas kelompok. Dalam situasi demikian, perdebatan masyarakat tentang *civil society* kemudian menjadi hanya sekedar untuk memperebutkan simbol-simbol agama. Kesimpulan seperti ini bisa jadi benar karena beberapa hal. *Pertama* kecenderungan umat Islam yang selalu reaksioner, dalam arti gemar memberi respon terhadap apa saja, termasuk yang datangnya dari Barat dengan menggunakan kacamata agama dengan semboyan "*al islamu ya'lu wa la yu'la*

‘alaih’ sehingga watak ego-sentrisme—dalam hal ini Islam sentris—kemudian menjadi tak terhindarkan. Konsekuensi logisnya adalah, wajah *civil society* di Indonesia pun kemudian menjadi sangat jauh dari semangat liberal, sekuler, non-profetik dan non transendental. *Kedua*, kelahiran *civil society* di Barat sesungguhnya berada dalam struktur masyarakat yang kapitalis, sedangkan umat Islam Indonesia tidak mempunyai referensi sosial-historis yang demikian. Atas dasar inilah, maka umat Islam kemudian menjadi sering salah paham dalam memahami *civil society*.

Terlepas dari perdebatan di atas, yang penting untuk dipertanyakan di sini adalah apa kaitan perbedaan tersebut dengan problematika pemaknaan *civil society* dalam spektrum besar umat Islam Indonesia. Politik identitas, inilah jawabannya. Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi kentalnya nuansa politik identitas di kalangan Islam Indonesia. *Pertama* pengukuhan suatu identitas keislaman yang lama, universal atau parokial, dalam bentuk-bentuk yang baru. *Kedua*, persoalan menyangkut “cap Barat” yang menjadi *trade mark civil society* kemudian menggiring pada pemilahan antara mana yang perlu dan mana yang tidak, serta ukuran-ukuran keberhasilannya. *Ketiga*, pergulatan ideologi antara satu kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain. Pergesegan ideologis ini menyuarakan bias yang cukup lebar hingga pada wilayah wacana publik dan praktik politik (*power struggle*). *Keempat*, realitas mutakhir yang mengkondisikan kecenderungan untuk melakukan afirmasi normatif ataupun pengingkaran terhadapnya. Dengan demikian, perdebatan menyangkut konsep *civil society* di kalangan Islam Indonesia sesungguhnya tidak banyak menyentuh wilayah praksis sosial. Hal ini terjadi lebih karena perdebatan yang ada justru menjauhi basis kognitif-epistemologis masyarakat Indonesia.

B. Saran – saran

Dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini secara khusus mengkaji wacana *civil society* dalam pemikiran sosial politik Islam Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sebagai salah satu model riset pemikiran ke-Islam-an di Indonesia. Masih banyak sisi lain yang belum tersentuh dari pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang bisa jadi justru menjadi bahasan yang cukup penting bagi perjuangan demokratisasi dan pemberdayaan *civil society* di Indonesia. Selain itu, pembahasan mengenai *civil society* dalam pemikiran Islam ternyata masih sangat terbatas. Kajian-kajian yang ada masih bersifat sangat teoritis dan seringkali tidak merujuk pada realitas empiris yang ada. Kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai tema ini sesungguhnya sangat diperlukan sekali dalam kerangka memberikan landasan moral dan teologis bagi upaya-upaya pemberdayaan umat Islam dan masyarakat bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, kajian tentang *civil society* yang ada selama ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menekankan pada pengayaan perspektif dan data-data empiris yang berkaitan dengan realitas masyarakat. Maka bagi para pemerhati, aktivis gerakan dan pemikir Islam, tema ini sesungguhnya perlu dikembangkan dalam rangka memperkuat basis gerakan dan pemikiran Islam dalam memberdayakan dan memperjuangkan posisi masyarakat sipil di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1989.

B. Fiqih

Abdurraziq, Ali, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

C. Literatur Lain

Al-Attas, Muhammad Naquib, *Islam dan Sekularisasi*, Bandung: Mizan, 1981.

Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jogjakarta: Arkola, 1994.

Al-Maududi, Abu A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ali, Fachry dan Bahtiar Efendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi pemikiran Islam Masa Orde Baru* Bandung: Mizan, 1986.

Abdurrahman, Muslim, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Abdussani, Humaidi, Ridwan Falak AS. (ed.), *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Al-Barbasy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Affandi, Arief, *Islam Demokrasi Atas Bawah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abdurraziq, Ali, *Khilafah dan Pemerintah dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Amal, Taufik Adnan (ed.), *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam Fazlurrahman*, Bandung: Mizan, 1993.

Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Anshor, Endang Saefuddin, *Kritik atas Faham dan Gerakan Pemikiran Pemikiran Nurcholish Madjid*, Bandung: Bulan Sabit, 1973.

- Arikuno, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arend, Hannah, *The Human Condition* Chicago: The University of Chicago Press, 1968.
- Audi, Robert, *Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal*, terj. Yusdani dan Aden Wijdan, Jogjakarta: UII Press, 2002.
- Asep, Gunawan, dan Dewi Nurjulianti (eds.), *Gerakan Keagamanan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF dan TAF, 1999.
- Azhari, Muntaha dan Abdul Mun'im Shaleh (eds.), *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Aziz, Ahmad Amir, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid* Jakarta: Rieneka Cipta, 1999.
- Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
-, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Jogjakarta: ISAI dan The Asia Foundation, 2000.
- Barton, Greg, *Bografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Jogjakarta: LKiS, 2003.
-, *Gagasan Islam liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahnad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Bakri, Syamsul dan Mudhofir, *Jombang Kairo Jombang Cicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia*, Surakarta: Tiga Serangkai, 2004.
- Bellah, Robert N, *Beyond Belief*, New York: Harper and Row, 1976.
- Berger, Peter, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bobbio, Norberto, *Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power*, Minneapolis: University of Minnesota press, 1989.

- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Jogjakarta: LKiS, 1994.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Bukhori, Pahrurroji, *Membebaskan Agama dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali Abd. Raziq*, Jogjakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Burhanuddin (ed.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* Jakarta: INCIS, 2003.
- Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Cohen, Jean L, and Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, London: MIT Press, 1992.
- Cox, Harvey, *The Sekuler City: Sekulerization and Urbanization in Theological Perspective*, Harmondsworth: Penguin, 1968.
- Culla, Suryadi, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Darwis, Ellyasa KH. (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Jogjakarta: LKiS, 1994.
- Djamaruddin Malik, Dedy, dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Diamond, Larry (ed.), *Revolusi Demokrasi Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Dian, Seri, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Jogjakarta: Dian Interfidei, 1994.
- Effendi, Djohan dan Ismed Natsir (ed.), *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Effendy, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
-, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Jogjakarta: Galang Press, 2001.

-, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Jogjakarta: Galang Pres, 2001.
- Elsthain, Jean Bethke, *Public, Man, Privat Women: Women in Social and Political Thought*, Concorde: Anansi, 1981.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzi, Nasrullah Ali (ed.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi* Bandung: Mizan, 1995.
- Fathani, Khairul dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhnuwwah dengan Muhammadiyyah*, Jogjakarta: Media Widya Mandala, 1993.
- Fealy, Greg, dan Greg Barton (eds.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama- Negara*, Jogjakarta: LKiS, 1997.
- Feillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara*, Jogjakarta: LKiS, 1999.
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Gaus AF, Ahmad dan Yayan Hendrayani (eds.), *Cak Nur Menuju Istana* Jakarta: KPP, 2003.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ghaffar, Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hall, John A. (ed.), *Civil Society: Theori, History, and Comparison*, Cambridge: Polity Press, 1995.
- Haidar, M. Ali, *NU dan Islam Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Habieb, Sa'adi Abu, *Ensiklopedi Ijma'*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Hamzah, Imran dan Choirul Anam (eds.), *Gus Dur Diadili Kiai-kiai*, Surabaya: Jawa Pos, 1989.

- Hafner, Robert W (ed.), *Democratic Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*, New Brunswick: Transaction Publisher, 1999.
- Hikam, Mohammad AS., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996.
-, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Hitti, Philip K., *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina, 1998.
- Idrus, Junaidi, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Ida, Laode, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
-, *Anatomi Konflik NU, Islam dan Negara* Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- INCREs, TIM, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2000.
- Joo, Han Sung, *The Failure of Democracy in Korea*, California: University of California Press, 1974.
- Jamhuri, Said, *Gus Dur: Pemimpin NU Kharismatik Kontroversial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Pemelihara Moral Masyarakat, 1998.
- Jones, Sidney, *The Construction and Expansion of The Ummah and The Role of Nahdlatul Ulama in Indonesia*, Cornel: Cornel University, 1985.
- KAHMI JAYA, Tim (ed.), *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran di Bidang Politik, sosial, Budaya, dan Ekonomi Menjelang Milenium Ketiga* Bandung: Mizan, 1998.
- Karim, Affan Ghafar, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karni, Asrori S., *Civil society dan Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, Jakarta: Logos, 1999.
- Keane, John, *Civil Society and The State*, New York: Verso Press, 1988.

- Kleden, Ignaz, "Negara, Demokrasi dan Civil society", *Halqoh*, Edisi XI, 2000.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* Bandung: Mizan, 1994.
- L. Laeyendecker, *Tata Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Liddle, William, *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mahasin, Aswab, (ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agan dan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal, 1996.
-, *Menyemai Kultur Demokrasi* Jakarta: LP3ES, 2000.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* Jakarta: LP3ES, 1996.
- Mulkan, Abdul Munir, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 dalam Perspektif sosiologis*, Jakarta: Rajawali Pres, 1989.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nasution, Muhammad Yunan, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ngatawi, Al-Zastrouw, *Gus Dur Siapa Sih Sampean? Tafsir Teoritik atas Pernyataan dan Tindakan dan Gus Dur* Jakarta: Erlangga, 1999.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modernisme Islam di Indonesia 1990-1942* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Noeh, Munawwar Fuad dan Mastuki HS (eds.), *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Siddiq*, Jakarta: Logos, 1999.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.

-, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
-, *Islam Kerakyatan dan KeIndonesiaan: Pikiran-pikiran Nurcholish Madjid Muda*, Bandung: Mizan, 1994.
-, *Khazanah Intelektual Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
-, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
-, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* Jakarta: Paramadina, 1995., hlm. 7.
-, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* Jakarta: Paramadina, 1999.
-, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1999.
-, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* Jakarta: Paramadina, 1998.
-, *Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokrasi* Jakarta: Voice Center, 2000.
-, *Kaki Langit Peradaban Islam* Jakarta: Paramadina, 1997.
-, *Masyarakat Religius* Jakarta: Paramadina, 1997.
-, *Fatsoen Nurcholish Madjid* Jakarta: Republika, 2002.
-, *Indonesia Kita* Jakarta: Gramedia, 2003.
-, *Kehampaan Spiritual dalam Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Mediacita, 2000.
- Oepen, Manfred dan Wolfgang Karcher (eds.), *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan* Jakarta: P3M, 1998.
- Parera, Frans M. dan T. Jakob Koekerits (eds.), *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara* Jakarta: Kompas, 1999.
- Prasetyo, Hendro dan Ali Munhanif, *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Rahman, Budi Munawar, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.

- Rahmat, Jalaluddin, et. al., *Tharikat Nurcholishy: Jejak Pemikiran dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rau, Zbigniew (ed.), *The Emergence of Civil Society in Eastern Europe and The Soviet Union*, Boulder: Westview Press, 1991.
- Rasyidi, M. *Koreksi terhadap Nurcholish Madjid tentang Sekularisasi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Ramage, Douglas E., *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, terj. Hartono Hadikusumo, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial* Jakarta: LP3ES, 1999.
-, *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999.
-, *Intelektual Inteljensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1996.
-, "Masyarakat Madani di Indonesia", *Paramadina*, Vol. 1, No. 2, 1999.
- Rumadi, "Jejak-jejak Liberalisme NU", *Taswirul Afkar*, Edisi No. 9/2000.
- Sadjzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2004.
- Scott, James C, *Senjataanya Orang-orang yang Kalah*, trrrj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting: Indonesia in The 1990s*, Leonard: Allen and Unwin, 1994.
- Seligman, Adam B., *The Idea of Civil Society*, New York: The Free Press, 1998.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sobary, Muhammad, *Moralitas Kaum Pinggiran*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sofyan, Ahmad dan Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara Islam*, Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 2003.

- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Jogjakarta: Kanisius, 1995.
- Syamsuddin, Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dan Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, NO, 2, Vol. IV, Tahun 1993.
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Sekularisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Silalahi, Harry, "Istirhatlah Dalam Damai", *Media Indonesia*, 30 Agustus 2005.
- Simon, Roger, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Jakarta: Insist, 1999.
- Suaedy, Ahmad (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Jogjakarta: LKiS, 2000.
- Suaedy, Ahmad dan Ulil Abshar Abdallah (eds.), *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, Jogjakarta: LKiS, 2000.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sufyanto dan Luluk Rofiqoh, *Puasa Titian Menuju Rayyan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Amien Rais* Jakarta: Teraju, 2005.
- Thaba, Abdullah Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
- Thoha, Zainal Arifin dan M. Aman Musthofa (eds.), *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan sosial NU*, Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 1997.
- Tim Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Tim Maula (ed.), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

- Tocqueville, Alexis de, *Democracy in America*, New York: Alfred A. Knof, 1994.
- Umari, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1999.
- Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU Apa NU Dibodohi: Jejak Langkah NU Era Reformasi, Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Jogjakarta: Ar Ruz, 2002.
- Wahid, Abdurrahman, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
-, *Muslim di tengah Pergumulan* Jakarta: Lapenas, 1981.
-, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
-, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Jogjakarta: LKiS, 2000.
-, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Jogjakarta: LKiS, 1999.
-, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran Abdurrahman Wahid Presiden RI Keempat*, Jakarta: Kompas, 1999.
-, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantra, 2001.
-, *Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas dan Reformasi Kultural*, Jogjakarta: LKiS, 1998.
-, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* Jakarta: Grasindo, 1999.
-, *Kumpulan Kolom dan Artikael Selama Era Lengser*, Jogjakarta: LKiS, 2002.
-, “Islam dan Pemberdayaan Civil Society: Pengalaman Indonesia”, *Halqoh*, Edisi No. 6/1998.
-, et. al, *Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
-, *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah dan Tafsiran Makna*, Jakarta: Kompas, 1999.